

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Selasa, 17 September 2019



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Selasa, 17 September 2019	Tol Bengkulu-Lubuklinggau: Konstruksi Tunggu Pembebasan Lahan	PT Utama Karya (persero) menyatakan masih menunggu tahap pembebasan lahan dalam proyek jalan tol Bengkulu-Lubuklinggau sejauh 95,8 kilometer.
2	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Selasa, 17 September 2019	Ibukota Baru Sudah Antisipasi Titik Api	Kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah daerah di Indonesia telah mengakibatkan bencana kabut asap, khususnya di Sumatra dan Kalimantan.
3	Bisnis Indonesia (Halaman 8)	Selasa, 17 September 2019	Hutama Karya Pacu Tol Medan-Binjai	Proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatra ruas Medan-Binjai terus dikebut kendati masih terkendala ganti rugi untuk pembebasan lahan.
4	Kompas (Halaman 13)	Selasa, 17 September 2019	Solusi untuk Masalah FLPP	Persoalan kuota FLPP yang habis pada Agustus lalu akhirnya menemukan jalan keluar. Pemerintah berupaya mencairkan dana tambahan sebesar Rp 1,5 triliun-Rp 2 triliun dalam satu hingga dua pekan mendatang.

Judul	Tol Bengkulu-Lubuklinggau: Konstruksi Tunggu Pembebasan Lahan	Tanggal	Selasa, 17 September 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	PT Utama Karya (persero) menyatakan masih menunggu tahap pembebasan lahan dalam proyek jalan tol Bengkulu-Lubuklinggau sejauh 95,8 kilometer.		

► **TOL BENGKULU-LUBUKLINGGAU**

Konstruksi Tunggu Pembebasan Lahan

Bisnis, BENGKULU — PT Utama Karya (Persero) menyatakan masih menunggu tahap pembebasan lahan dalam proyek jalan tol Bengkulu—Lubuklinggau sejauh 95,8 kilometer. Jalan tol ini menjadi satu dari tiga ruas Trans Sumatra yang akan dibangun di koridor Palambang—Bengkulu

Manajer Pelaksana dan Pengendalian Tol Bengkulu-Taba Penanjung Utama Karya Vinjay Endika mengatakan saat ini tahap penentuan lokasi sudah selesai pada seksi I sejauh 17,8 kilometer. Seksi ini menghubungkan Bengkulu dengan Taba Penanjung.

“Yang paling siap seksi I. Kami masih menunggu pembebasan lahan yang menjadi ranah PPK [Pejabat Pembuat Komitmen] lahan [Kementerian] PUPR dan ATR [Kementerian Agraria Tata Ruang],” ujarnya kepada *Bisnis* di Bengkulu, Minggu (15/6).

Sebagaimana diketahui, tahap konstruksi baru bisa dilakukan setelah lahan sudah dibebaskan. Tahap pembebasan lahan menjadi porsi pemerintah. Dalam tahap ini, badan usaha jalan tol bisa ikut berperan dengan menyalurkan dana talangan tanah yang akan diganti oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Vinjay mengatakan, kontur lahan

yang akan dibangun jalan tol di ruas Bengkulu—Lubuklinggau terbilang menantang karena melintasi Pegunungan Bukit Barisan. Dalam pantauan Tim Jelajah Infrastruktur Sumatra 2019, kontur berbukit ini berada di Kabupaten Kepahiang.

Saat ini, jalan penghubung dari Kota Bengkulu menuju Kepahiang banyak kelokan. Penduduk Bengkulu menye-



but jalur itu sebagai “Liku Sembilan”. *Bisnis* perlu waktu 90 menit Saat melewati jalur sepanjang 28 kilometer itu pada Sabtu (14/9).

Dari Taba Penanjung, trase jalan tol berlanjut ke Kepahiang sepanjang 23,7 kilometer. Kemudian, trase berlanjut ke Lubuklinggau sejauh 54,5 kilometer.

OKUPANSI HOTEL

Di lain pihak, kalangan pelaku usaha berharap proyek jalan tol Bengkulu-Lubuklinggau bakal memancing kenaikan tingkat okupansi kamar (TPK).

Mien, Pengelola Grand Jitra Guest House mengatakan keberadaan jalan tol di Bengkulu bakal mempercepat waktu tempuh sehingga bisa mendorong peningkatan kunjungan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, okupansi hotel berbintang di Bengkulu mencapai 66% pada Juni 2019. Angka itu merupakan yang tertinggi di Sumatra.

Secara keseluruhan, ada 10 hotel bintang dan 180 hotel nonbintang di Bengkulu pada 2018 atau bertambah 6 hotel dibandingkan dengan posisi 2017. Sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum di Bengkulu tumbuh 10,16% dan menjadi sektor pertumbuhan tertinggi per Juni 2019.

Sementara itu, kalangan perbankan di Sumatra bagian Selatan menilai pengoperasian jalan tol bakal meningkatkan penetrasi transaksi nontunai di wilayah tersebut. Saat ini transaksi nontunai belum populer karena ekosistem belum sepenuhnya mendukung. Head of Performance and Channel Management Group Bank BNI Wilayah Palembang Yudi Indra mengatakan saat ini penggunaan kartu uang elektronik baru diterapkan secara konsisten di sektor transportasi. (Rivki

Maulana/Ropesta Sitorus)

Judul	Ibukota Baru Sudah Antisipasi Titik Api	Tanggal	Selasa, 17 September 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah daerah di Indonesia telah mengakibatkan bencana kabut asap, khususnya di Sumatra dan Kalimantan.		

► **KEBAKARAN HUTAN**

Ibu Kota Baru Sudah Antisipasi Titik Api

Bisnis, JAKARTA — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah daerah di Indonesia, telah mengakibatkan bencana kabut asap, khususnya di Sumatra dan Kalimantan. Penyiapan ibu kota baru di Kalimantan Timur, telah memperhitungkan potensi kebakaran tersebut.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa lokasi calon Ibukota yang baru, tepatnya di Penajam Utara dan Kutai Kartanegara, sudah melalui proses survei dan jauh dari daerah dengan kadar batu bara.

"Kami sudah survei, kalau yang di sebelah timur [lokasi Ibukota baru], atau timurnya [Taman Hutan Raya Bukit] Soeharto, Samboja,

itu daerah batu bara. Tapi sebelah utaranya batu baranya tidak signifikan menurut survei kami. Batu bara itu bahaya kalau kebakaran, bisa tahunan itu lama kebakarannya," ujarnya di Jakarta, Senin (16/9).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mencatat sekurangnya telah terjadi 30 kali kebakaran hutan dan lahan di daerah yang telah ditetapkan sebagai lokasi pemindahan Ibukota tersebut.

"Hingga saat ini tercatat lebih dari 30 kebakaran lahan terjadi di wilayah Penajam Paser Utara," ujar Kepala Ex-Officio BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara, Tohar seperti dikutip dari Antara, Sabtu (14/9).

Senada dengan Menteri Basuki, Pelaksana Harian Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo optimistis bahwa pemerintah pusat pasti sudah memperhitungkan kondisi alam Kalimantan yang memang sangat berpotensi terjadi karhutla.

"Kalimantan kan memang lahannya seperti itu [rawan terbakar], tapi saya yakin pemerintah pasti sudah memperhitungkan lokasi Ibukota yang baru," katanya kepada *Bisnis*, Senin (16/9).

Langkah antisipatif terhadap karhutla yang bisa dilakukan dalam tata kelola kota adalah tidak membiarkan lahan dalam kondisi kering. Artinya, lahan itu harus dijaga agar tetap basah seperti dengan membangun saluran air. *(Aprianus Doni Tolok)*

Judul	Hutama Karya Pacu Tol Medan-Binjai	Tanggal	Selasa, 17 September 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 8)		
Resume	Proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatra ruas Medan-Binjai terus dikebut kendati masih terkendala ganti rugi untuk pembebasan lahan.		

Hutama Karya Pacu Tol Medan–Binjai

Bisnis, MEDAN — Proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatra ruas Medan-Binjai terus dikebut kendati masih terkendala ganti rugi untuk pembebasan lahan. Penyelesaian pembebasan lahan total ditargetkan dapat rampung hingga akhir September 2019.

Pimpinan Proyek Jalan Tol Medan-Binjai PT Utama Karya Hestu Budi Husodo mengatakan, terdapat 6 hektare lahan di wilayah itu yang masih perlu dibebaskan untuk menyelesaikan konstruksi sesuai dengan target.

“Pembebasan lahan belum selesai, tinggal Seksi 1 sepanjang 500 meter di Simpang Tanjung Mulia. Targetnya akhir September ini bisa selesai,” kata Hestu kepada *Bisnis*, Senin (16/9).

Untuk progres konstruksi tol Medan-Binjai sepanjang 17 km sudah mencapai kurang lebih mencapai 80%, sedangkan untuk pembebasan tanah sudah mencapai 86%.

Sebelumnya, pembebasan lahan tersebut ditargetkan dapat selesai pada Agustus, tetapi hingga saat ini

proses masih belum selesai. Pada lahan yang masih dalam tahap pembahasan, untuk pelaksanaannya masih menunggu proses pembayaran ganti rugi dan pembongkaran bangunan 2,27 km.

Selain itu berdasarkan temuan lapangan, terdapat penggarap lahan kosong yang menuntut ganti rugi pembebasan tanah, mengingat beberapa dari mereka sudah bertahun-tahun menggarap lahan tersebut, misalnya untuk menanam padi. Belum lagi terdapat penunjukan batas penguasaan lahan yang sering berpindah, sehingga ukuran lahan menjadi berubah-ubah.

“Masyarakat penguasa lahan tidak segera melengkapi dokumen untuk pembayaran, sehingga pembayaran terhambat. Pembayaran menunggu kelengkapan dokumen masyarakat tersebut,” jelasnya.

Adapun pada pembebasan lahan Seksi 1, jumlah bidang yang perlu dibebaskan sebanyak 471 bidang. Dari jumlah itu sebanyak 241 bidang yang sudah dibayarkan, atau sekitar 51,17%. (*Asteria Desi K. Sari*)

Judul	Solusi untuk Masalah FLPP	Tanggal	Selasa, 17 September 2019
Media	Kompas (Halaman 13)		
Resume	Persoalan kuota FLPP yang habis pada Agustus lalu akhirnya menemukan jalan keluar. Pemerintah berupaya mencairkan dana tambahan sebesar Rp 1,5 triliun-Rp 2 triliun dalam satu hingga dua pekan mendatang.		

PERUMAHAN

Solusi untuk Masalah FLPP

JAKARTA, KOMPAS — Persoalan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP yang habis pada Agustus lalu akhirnya menemukan jalan keluar. Pemerintah berupaya mencairkan dana tambahan sebesar Rp 1,5 triliun-Rp 2 triliun dalam satu hingga dua pekan mendatang.

Kepastian pengalokasian dana tambahan FLPP diputuskan dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/9/2019).

"Tadi Pak Presiden sudah menelepon Menteri Keuangan, minta agar kekurangan dana

FLPP sekitar Rp 1,5 triliun-Rp 2 triliun dipenuhi," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sesuai pertemuan.

Dalam pertemuan itu, pengusaha properti mengeluhkan kuota FLPP yang habis pada Agustus lalu. Padahal, menurut Ketua Umum REI Soelaeman Soemawinata, pengusaha properti masih memerlukan dana subsidi FLPP hingga akhir tahun ini.

"Masalah krusial yang kami sampaikan kepada Presiden, saat ini kehabisan kuota FLPP, yang hanya bisa sampai Agustus," katanya sesuai pertemuan.

Terkait persoalan itu, Basuki Hadimuljono menjelaskan, kebutuhan dana subsidi untuk

perumahan pada 2019 sebesar Rp 8,6 triliun. Namun, dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), pos anggaran FLPP hanya mendapat alokasi Rp 7,1 triliun. Dana Rp 7,1 triliun itu sudah habis untuk menyubsidi sekitar 70.000 rumah hingga Agustus. Oleh karena itu, beberapa waktu lalu Kementerian PUPR mengajukan usulan penambahan dana FLPP Rp 1,5 triliun-Rp 2 triliun, sesuai kebutuhan masyarakat.

Keputusan untuk menyiapkan dana tambahan FLPP itu sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat realisasi program 1 juta rumah. Selain itu, juga untuk mengurangi kekurangan rumah atau backlog yang mencapai 11,4 juta rumah. (NTA)